Nama : Risky Fausia

Nim : 10200119097

Kelas : HTN D

Mata kuliah : Hukum Administrasi Negara

1. Kedudukan hukum dan fungsi pemerintah

a. Kedudukan hukum

Kedudukan hukum terhadap pemerintah terbagi menjadi dua yaitu : hukum pemerintah pada bidang public, Macam-macam jabatan, pemerintah Kedudukan hukum pemerintah pada bidang hukum privat. Pembagian hukum public dan privat sebenarnya dilakukan sudah sejak lama oleh salah satu ahli hukum romawi, yaitu hukum public yang berkenaan dengan kesejahteraan untuk bangsa romawi sedangkan hukum privat mengatur tentang hubungan kekeluargaan, hingga saat ini pembagian hukum tersebut yang dilakukan oleh salah satu ahli romawi itu memiliki pengaruh yang sangat besar dalam sejarah pemikiran hukum bahkan sampai sekarang, salah satu pengaruh yang masih terasa antara lain adalah kita tidak dapat menghindari dari pembagian hukum privat tersebut termasuk dalam hal menganalisis, mengkaji dan mengkaji keberadaan pemerintah dalam melakukan pergaulan hukum, dalam pergaulan hukum pemerintah ini itu sering kali berkepala dua yakni sebagai wakil dari jabatan yang tunduk pada hukum public dan wakil dari badan hukum privat.

Perbedaan hukum publik dan hukum privat yaitu, *pertama* kepentingan

hukum publik mengatur kepentingan umum dan hukum privat mengatur kepentingan khusus atau perdata, *kedua* metode mempertahankan hukum publik dipertahankan oleh pemerintah sedangkan hukum privat dipertahankan oleh individu ke individu, *ketiga* asas hukum dari hukum public memuat asas istimewa dan hukum privat memuat asas biasa. *Keempat* hubungan hukum public yaitu pemerintah dengan warga Negara sedangkan hukum privat hubungan antar warga Negara, dan yang *kelima* sifat hukum publik memaksa sedangkan privat tidak memaksa.

Macam-macam Jabatan Pemerintahan dalam administrasi Negara atau tata usaha Negara meliputi;

- a. Insatansi pemerintah dibawah presiden sebagai kepala eksekutif.
- b. Instansi dalam lingkup Negara diluar dari kekuasaan eksekutif yang berdasar kepada perpu untuk melaksanakan urusan pemerintahan.
- c. Badan hukum perdana didirikan oleh pemerintah untuk melaksanakan tugas pemerintah.
- d. Instansi merupakan kerja sama antara pihak pemerintah dengan pihak swasta dalam melaksanakan tugas pemerintahan.
- e. lembaga hukum swasta berdasarkan perpu dan system perizinan melakukan tugas pemerintahan

fungsi pemerintahan

- Fungsi Pelayanan

Kewenangan pemerintah pusat mencakup urusan Pertahanan Keamanan, Agama, Hubungan luar negeri, Moneter dan Peradilan. Secara umum pelayanan pemerintah mencakup pelayanan publik dan pelayanan sipil yang menghargai kesetaraan.

- Fungsi Pengaturan

Fungsi ini dilaksanakan pemerintah dengan membuat peraturan perundang-undangan untuk mengatur hubungan manusia dalam masyarakat. Pemerintah adalah pihak yang mampu menerapkan peraturan agar kehidupan dapat berjalan secara baik dan dinamis

- Fungsi Pembangunan

Dalam pembangunan pemerintah harus menjadi pemicu pembangunan wilayah dimana pembangunan ini menyangkup semua aspek kehidupan

- Pemberdayaan (Empowerment)

Fungsi ini untuk mendukung terselenggaranya otonomi daerah, fungsi ini menuntut pemberdayaan Pemerintah Daerah dengan kewenangan yang cukup dalam pengelolaan sumber daya daerah guna melaksanakan berbagai urusan yang didesentralisasikan. Untuk itu Pemerintah Daerah perlu meningkatkan peranserta masyarakat dan swasta dalam kegiatan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.

Daftar Pustaka

- E. Utrecht. Pengantar hukum administrasi Negara, Jakarta, 1970
- Prajudi atmosudirdji. Hukum administrasi Negara. Jakarta: ghalia Indonesia
- Ambtsdragers in Nederland en in Indonesia, Juridische Boekhandel en Uitgeverij A. Jongbloed & Zoon's -Gravenhage , 1954, hlm. 36. F.A.M. Stroink en J.G. Steenbeek, op. Cit., hlm. 36. Muhammad Zainul Arifin, Understanding The Role Of Village Development Agency In